

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMERINTAH DESA
DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SEA KECAMATAN PINELENG
KABUPATEN MINAHASA**

*Gabriela Ribka Benjamin¹
Johannis Kaawoan²
Agustinus Pati³*

Abstrak

Secara empirik Implementasi serta penerapan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan pada Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa belum berjalan secara optimal. Fenomena ini dapat dilihat dari pembuatan DaftarUsulan Rencana Proyek (DURP) yang seharusnya direncanakan oleh pemerintah desa dan BPD atas usul masyarakat desa, ternyata hanya dibuat oleh Kepala Desa dan aparat kecamatan tanpa diketahui secara luas oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sea dalam melaksanakan pembangunan sudah melalui proses perencanaan ini dilihat program perencanaan pembangunan yang sudah di laksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan musyawarah bersama masyarakat, dan dalam menjalankan roda pemerintahan di desa Sea, pemerintah desa sudah menjalankan sebagaimana mestinya, ini dilihat dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah sebelum proses pembangunan dilakukan, dilakukannya terlebih dahulu musyawarah bersama masyarakat tentang pembangunan dan arah kebijakan pembangunan di desa Sea, akan tetapi masih ada juga ditemukan dari masyarakat desa tentang kinerja pemerintahan desa yang seringkali membingungkan masyarakat, hal ini di lihat dari arah kebijakan pembangunan yang seringkali tidak memberitahukan kepada masyarakat tentang pembangunan yang akan dilaksanakan

Kata Kunci: Implementasi, Manajemen, Pembangunan.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Karakteristik manajemen yang baik dalam pembangunan desa memiliki sifat yang multidimensional menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat di desa. Dari sudut pemerintahan yang dioperasionalkan melalui berbagai sektor dan program yang saling terkait dan pelaksanaannya, dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah. Pada realitasnya, masyarakat desa sampai saat ini tetap memiliki berbagai keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya modal. Kerjasama yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat akan menciptakan pola hubungan yang serasi dalam proses pelaksanaan pembangunan di pedesaan. Hal menonjol dilihat dari aspek pemerintahan adalah pelaksanaan organisasi pemerintahan desa yang belum secara optimal berjalan dengan baik, sehingga pertumbuhan dan perubahan sosial di desa relatif lambat, untuk mencapai hasil maksimal pembangunan, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga selesainya pembangunan, yang kata kuncinya diperlukan pengelolaan secara sistematis. Dilain konteks ini, sistem manajemen pemerintahan sebagai perangkat integral dan melekat dengan pengelolaan pembangunan desa berfungsi untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan itu, aspek kemampuan aparat pemerintahan desa sebagai penentu dan penyelenggara manajemen pemerintahan desa harus dapat menciptakan nilai keadilan dalam proses pembangunan desa. Nilai keadilan itu berkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga negara yang harus terlayani secara menyeluruh oleh pemerintah desa.

Pada penyelenggaraan fungsi pembangunan di desa dibutuhkan kemampuan manajerial aparat pemerintah desa yang handal dalam usaha memberikan kepuasan bagi masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan desa sesuai tujuan keberadaan institusi pemerintahan sebagai organisasi publik. Secara empirik Implementasi serta penerapan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan pada Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa belum berjalan secara optimal. Fenomena ini dapat dilihat dari pembuatan *Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP)* yang seharusnya direncanakan oleh pemerintah desa dan BPD atas usul masyarakat desa, ternyata hanya dibuat oleh Kepala Desa dan aparat kecamatan tanpa diketahui secara luas oleh masyarakat. Proses pelaksanaan pembangunan juga tidak mengikutsertakan masyarakat. Pelaksana kegiatan dilakukan Kepala Desa dan aparat kecamatan tanpa mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat desa sehingga prospek pembangunan bukan mengarahkan kepada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat tetapi hanya sekedar untuk membangun sehingga ada segudang harapan masyarakat dalam pembangunan di Desa Sea. Dalam menjamin kehidupan dan kenyamanan hidup belum tercapai seperti masalah jalan lorong, pertanian, saluran irigasi dan berbagai masalah kebutuhan masyarakat belum terpenuhi dan belum terbangun karena tidak teraturnya pola manajemen pembangunan di desa Sea dengan baik.

Begitu pula pada aspek pengawasan hasil pembangunan, tidak pernah diperiksa oleh BPD, tetapi diperiksa oleh pihak kecamatan. Dengan demikian sejauh ini pelaksanaan pembangunan desa masih

didasarkan atas kemauan dan keinginan Kepala Desa dan pihak kecamatan, belum atas dasar pertimbangan keinginan dan kemauan masyarakat desa. Masalah-masalah di atas menguatkan asumsi bahwa manajemen pemerintah desa dalam mengelola manajemen pemerintahan desa masih sangat rendah, bahkan aktivitas manajemen tidak dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa. Kondisi ini, dapat menyebabkan kualitas pengelolaan manajemen pemerintah desa yang menunjang keberhasilan pembangunan desa menjadi rendah. Padahal pembangunan desa yang merupakan keterpaduan antar berbagai kebijakan pemerintah dengan partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat, perlu didukung dengan kemampuan manajemen perangkat pemerintah desa dalam menciptakan iklim keterpaduan yang serasi dan berkesinambungan dalam memanfaatkan segala sumber daya di desa untuk didayagunakan dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Tinjauan Pustaka

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat hal itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Secara etimologis pengertian implementasi menurut kamus Webster implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan *to give practical*

effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) Solly Lubis 2004: 67.

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Ndraha 1991:37). Kemudian dalam Siagian 1985:14, bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu, Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam prakteknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandate dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa saja yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna yaitu efektif dan efisien (darma salam 2007:12), yang dengandemikian manajemen melibatkan berbagai elemen organisasi baik internal, sarana, prasarana, alat, barang, maupun fungsi dan kedudukan (jabatan) dalam organisasi yang diatur sedemikian rupa dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen memberdayakan segenap unsur sumber daya organisasi yang sedemikian rupa secara harmonis dalam mencapai tujuan organisasi sehingga dalam manajemen mengisyaratkan adanya unsur kepemimpinan, pengambilan keputusan, hubungan antarmanusia dan manusianya itu sendiri..

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam implementasi pemerintahan pada masing-masing daerah, dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang juga dijabarkan pada penataan pemerintahan desa dengan lahirnya Undang-undang tentang desa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 yaitu, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana isi Peraturan Pemerintah Pemerintah itu memuat tentang Kewenangan Desa yang meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga semakin menguatkan posisi daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan di segala bidang, karena semua yang menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaan sepenuhnya kepada daerah, terutama Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi daerah.

Pemerintahan desa sebagai satuan pemerintahan dalam struktur ketatanegaraan terendah, secara operasional menjadi komponen terdepan yang berhadapan langsung dengan aktivitas kehidupan masyarakat. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara prosedural disampaikan melalui pemerintahan desa, selanjutnya secara struktural diteruskan kepada pemerintah

tingkat atasnya (pemerintah kecamatan). Demikian pula sebaliknya, berbagai kebijaksanaan dan program yang diimplementasikan pemerintah dijabarkan melalui satuan pemerintahan sampai pada tingkat desa yang langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Pemerintahan desa menyanggah tugas dan kewajiban ganda atau dwifungsi pemerintahan. Terhadap pemerintah, ia bertindak sebagai wakil masyarakat, dan terhadap masyarakat ia bertindak selaku wakil dari pemerintah. Fungsi tersebut, menempatkan pemerintah desa sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakatnya.

Dalam upaya melaksanakan tugasnya, institusi pemerintah menurut Katz "memerlukan dukungan struktur (organisasi) seperti dasar hukum, tata kerja, biaya, fasilitas, personil dan sebagainya, serta dukungan lingkungan yang berfungsi sebagai masukan dalam pelaksanaan tugas" Dukungan struktur organisasi ini, meliputi: (1) kemampuan menyiapkan sarana bagi pelaksanaan tugas, (2) kemampuan memelihara pola perilaku organisasi, dan (3) kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengendalikan lingkungan yang bersangkutan.

Sebagai unit pemerintahan terendah, pemerintah desa mempunyai otonomi dalam arti berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga mempunyai tugas lain sebagai bagian dari segenap wewenang dan kewajibannya, yaitu pelaksanaan tugas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan yang dibebankan oleh pemerintah tingkat atasnya. Hal ini diikuti pula dengan tanggungjawab aparat pemerintahan desa dalam manajemen dan mengarahkan

organisasi kemasyarakatan sebagai organisasi yang berdiri sendiri, yang tumbuh atas keinginan rakyat, menjadi harapan besar sehingga dapat berperan dalam membantu pemerintahan desa dalam mengelola pembangunan desa.

Penerapan manajemen profesional dalam tanggung jawab dalam organisasi pemerintah daerah mengharuskan adanya kejelasan wewenang dan tanggungjawab masing-masing unit penyelenggara dari aparat pemerintah agar masyarakat mudah memperoleh data dan informasi tentang kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan sudah dijalankan sehingga muncul sikap partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kebijaksanaan publik yang terkait dengan dirinya. Selain itu, perlu diterapkan prinsip akuntabilitas, yang menuntut aparat pemerintah untuk mampu mempertanggungjawabkan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan ketiga komponen, yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya manusia. Selanjutnya perlu diterapkan prinsip responsibilitas, yang menuntut aparat pemerintah mendasarkan setiap tindakannya pada aturan hukum, baik yang terkait dengan lingkungan eksternal (masyarakat luas) maupun yang berlaku di lingkungan internal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial.

Adapun fokus penelitian dalam hal ini sebagaimana fungsi manajemen yang ada maka penulis mengambil 3 dari 5 fungsi manajemen yang ada yaitu

1. Implementasi perencanaan dalam pembangunan di desa Sea
2. Implementasi pergerakan dalam pembangunan di desa Sea
3. Implementasi pengendalian dalam pembangunan di desa Sea

Yang tentunya dilaksanakan oleh pemerintah desa yang ada sehingga pembangunan belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Adapun sampel yang ditetapkan secara *purposive* sebagai informan yang diwawancarai yaitu terdiri dari pihak yang melaksanakan pembangunan dalam hal ini Kepala desa, Sekertaris desa, Kepala urusan pembangunan dan 4 perangkat desa, sedangkan dari pihak penerima dalam hal ini masyarakat yaitu; unsur Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan 3 tokoh masyarakat serta 2 masyarakat dari beberapa lingkungan yang ada.

Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara tentang bagaimana kemampuan aparatur Pemerintah Desa dalam memanageril kegiatan pemerintah desa dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen pemerintah desa, Bpk. James R. Sangian selaku Kepala Desa mengatakan bahwa ; *“Kemampuan manajemen pemerintah desa Sea dalam menerapkan fungsi-fungsinya sampai saat ini cukup baik, akan tetapi masih ada kelemahan-kelemahan yang terjadi, dimana dapat dilihat dalam penyusunan program pembangunan seringkali aparat pemerintah desa menyerahkan langsung kepada saya selaku kepala desa. Senada juga dikatakan oleh Kasie Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bpk. James E. Giroth, SPd yang mengatakan: “Kami selaku aparat desa Sea sebenarnya sangat loyal dalam memanageril tugas dan fungsi kami dalam pemerintahan desa. Akan tetapi disetiap ada program-program*

pembangunan yang ada di desa, terkadang kepala desa tidak memberitahukan kepada kami karena program tersebut ternyata sudah disusun oleh pihak kecamatan dan kepala desa Sea, hal ini tentunya menghambat kinerja kami. Sehubungan dengan hasil wawancara tersebut, kemampuan aparat desa Sea dalam manajemen pemerintahan menunjukkan tidak adanya saling sinkron antara kepala desa dan aparat desa, hal ini diperkuat juga dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Sea Bpk. Jolly Mewo yang mengatakan: *“Kami selaku masyarakat desa Sea selama ini melihat kinerja aparat pemerintah desa dalam manajemen pemerintahan sangat kurang baik, ini karena banyak program-program yang dilakukan bukan dari rapat kerja bersama kaur-kaur pemerintah dan masyarakat desa melainkan program dari kecamatan yang langsung diturunkan kepada kepala desa tanpa sepengetahuan kami selaku masyarakat.* Berdasarkan hasil wawancara tersebut tentu hal ini sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat bahkan aparat desa Sea sendiri, sehingga dalam proses pembangunan di desa Sea seringkali terkendala karena pembangunan yang diprogramkan bukan dari musyawarah bersama masyarakat sehingga dalam proses penyusunan program-program selalu menuai protes dari masyarakat desa Sea karena program-program itu bukan dari usulan-usulan masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu pemerintahan desa sebagai satuan pemerintahan dalam struktur ketatanegaraan terendah, secara operasional menjadi komponen terdepan yang berhadapan langsung dengan aktivitas kehidupan masyarakat. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara prosedural disampaikan melalui pemerintahan desa, selanjutnya secara

struktural diteruskan kepada pemerintah tingkat atasnya (pemerintah kecamatan). Demikian pula sebaliknya, berbagai kebijaksanaan dan program yang diimplementasikan pemerintah dijabarkan melalui satuan pemerintahan sampai pada tingkat desa yang langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pemerintahan desa menyanggah tugas dan kewajiban ganda atau dwi fungsi pemerintahan. Terhadap pemerintah, ia bertindak sebagai wakil masyarakat, dan terhadap masyarakat ia bertindak selaku wakil dari pemerintah. Fungsi tersebut, menempatkan pemerintah desa sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakatnya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh sekretaris desa Bpk. Vecky Sampoel, tentang bagaimana kemampuan aparatur pemerintah desa Sea dalam pengelolaan organisasi, beliau mengatakan bahwa; *“Aparatur pemerintah desa Sea dalam pengelolaan organisasi sangat baik, karena di desa Sea sudah ada organisasi atau lembaga-lembaga yang berjalan dengan baik, antara lain ; BPD, PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani, Linmas, kerukunan Marga, dll, kesemua organisasi dan lembaga-lembaga tersebut tidak lain dibuat/diusung oleh pemerintah desa Sea.* Organisasi dan lembaga-lembaga ini tentu sangat membantu pemerintah desa dalam kegiatan di desa Sea, itu juga tidak terlepas dari kinerja aparat pemerintah dalam mengontrol dan memanageril organisasi-organisasi tersebut,

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat dari informan tentang Implementasi manajemen pemerintahan dalam pembangunan di desaSea, maka dalam pelaksanaan proses pembangunan pemerintah desa Sea menjalankan tugasnya berdasarkan program-program yang telah disusun

bersama-sama dengan masyarakat desa. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan di desa Sea, pemerintah desa Sea mengacu pada arah rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) sesuai visi dan misi desa.

Pelaksanaan pembangunan dalam lima tahun perlu diatur penetapan dan prioritas pembangunan merupakan urutan atau tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan ke dalam bentuk program-program pembangunan, yang tingkat kepentingannya akan menjadi prioritas utama sesuai dengan urutannya. Prioritas pembangunan tidak lain merupakan penjabaran atas misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sea yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2013 – 2018. Prioritas pembangunan di desa Sea, adalah sebagai berikut :

- a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- b. Peningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- c. Peningkatan kualitas ketahanan pangan;
- d. Peningkatan infrastruktur;
- e. Penanggulangan kemiskinan;
- f. Keadilan dan kesetaraan gender;
- g. Pelestarian lingkungan hidup.

Tema pembangunan merupakan paling utama atau koridor pembangunan yang menjadi acuan dalam pencapaian tujuan pembangunan pada masing-masing tahapan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sea selama 5 (lima) tahun pelaksanaannya, yaitu dari tahun 2013 – 2018.

Tema pembangunan yang akan diangkat untuk masing-masing tahun pelaksanaan Rencana Penguasaan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sea adalah sebagai berikut:

1. Tahun Pertama (*Tahun Kelembagaan dan Penataan*)

Pada tahun pertama RPJMDesSea periode 2013 – 2018 atau tahun Kelembagaan dan Penataan diarahkan untuk memperkokoh tiang pancang kelembagaan pemerintahan Desa dan seluruh sector pembangunan Desa Sea sebagai penopang utama pelaksanaan pembangunan di desa Sea selama jangka waktu lima tahun masa pembangunan desa periode 2013 – 2018. Penataan seluruh sector pembangunan dilakukan untuk mempersiapkan seluruh lini pembangunan di desa Sea untuk menghadapi periode pembangunan yang akan berjalan dengan lebih pesat di masa yang akan datang.

Pengutan kelembagaan dilakukan tidak hanya pada lembaga pemerintah daerah, namun juga pada kelembagaan social masyarakat dan kelembagaan politik yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kemajuan pembangunan Desa Sea.

2. Tahun Kedua (*Tahun Pelayanan Dasar Untuk Semua*)

Pada tahun kedua RPJMDesSea periode 2013 – 2018 atau disebut juga sebagai tahun pelayanan dasar. Semua diarahkan untuk mencapai pemenuhan pelayanan dasar dalam kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat desa Sea dapat *Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang professional dan berdaya saing.*Selain itu pada tahun kedua pembangunan RPJMDes periode 2013 – 2018 diarahkan untuk dapat memperkuat aspek ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga memberikan jaminan kondusifitas desa Sea di tahun-tahun berikutnya.

3. Tahun ketiga (*Tahun Infrastruktur dan Utilitas*)

Pada tahun ketiga RPJMDesSea periode 2013 – 2018 atau tahun Infrastruktur dan Utilitas diarahkan untuk memberikan landasan pembanguann yang bertumbuh pesat melalui penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan terutama pada infrastruktur dan utiliutas dasar yang menjadi pendorong bagi masuknya modal pihak swasta seperti jaringan jalan, jaringan listrik dan ketersediaan air bersih, dengan didukung oleh peningkatan pelayanan transportasi, serta perumahan dan pemukiman dengan dibarengi pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sehingga *Meningkatkan kualitas dan fasilitas infrastruktuur desa, teknologi informasi dan komunikasi serta pembanguann kawasan strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan.*

4. Tahun Keempat (*Tahun Investasi dan Perekonomian Desa*)

Pada tahun keempat RPJMDesSea periode 2013 – 2018 atau disebut sebagai tahun investasi dan perekonomian daerah diarahkan untuk memperkokoh kapasitas perekonomian desa Sea sehingga dapat Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi karakyatan, insentif investasi serta pemberdayakan pelaku bisnis dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan prinsip “Sitou Timou Tumou Tou”.

5. Tahun Kelima (*Tahun Inovasi dan Kreativitas*)

Pada tahun kelima atau tahun terakhir RPJMDes Sea periode 2013 – 2018 atau tahun inovasi dan kreativitas diarahkan untuk mencapai tata kehidupan masyarakat desa Sea yang seimbang pada seluruh aspek dengan menyempunakan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya dengan memperkuat

peningkatan potensi masyarakat pada sisi pariwisata, seni, pemuda, dan olahraga serta peningkatan kualitas lingkungan hidup sehingga terwujud Pengembangan kehidupan masyarakat social budaya yang dinamis namun tetap melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religious bersendikan kearifan local Budaya Minahasa.

Kesimpulan

1. Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan *demokratik*, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan.
2. Desa Sea dalam melaksanakan pembangunan sudah melalui proses perencanaan ini dilihat program perencanaan pembangunan yang sudah di laksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan musyawarah bersama masyarakat.
3. Dalam menjalankan roda pemerintahan di desa Sea, pemerintah desa sudah menjalankan sebagaimana mestinya, ini dilihat dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah sebelum proses pembangunan dilakukan, dilakukannya terlebih dahulu musyawarah bersama masyarakat tentang pembangunan dan arah kebijakan pembangunan di desa Sea, akan tetapi masih ada juga ditemukan dari masyarakat desa tentang kinerja pemerintahan desa yang seringkali membingungkan masyarakat, hal ini di lihat dari arah kebijakan pembangunan yang seringkali tidak memberitahukan kepada masyarakat tentang

pembangunan yang akan dilaksanakan.

Saran

1. Kepala desa hendaknya dalam penyusunan-program pembangunan selalu melibatkan masyarakat agar masyarakat tidak ada lagi yang kebingungan akan pembangunan yang ada.
2. Perlu adanya kerjasama yang baik antara kepala desa dan aparat-aparat desa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.
3. Sebelum melaksanakan pembangunan selayaknya dimusyawarakan terlebih dahulu bersama masyarakat tentang arah pembangunan yang akan dilakukan.
4. Lebih meningkatkan sumber daya manusia bagi aparat desa dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa secara efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N. dan David W. Young. 2003:53 . *Management Control in Nonprofit Organization*. USA: Mc-Graw-Hill Irwin.
- Arief Budiman(1997: 1-2),*Teori Pembangunan dunia ketiga*, Gramedia
- Bogdan dan Taylor dalam Moleong. 2001: 5. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rosda
- Bryson, J. dan W. Roering. 1987 : 57. *Applying private-sector strategic management in the public sector* dalam *Handbook of Strategic Management*, Jack Rabin, Gerald J. Miller, W.Bartley Hildreth, 2000. New York: Marcel Dekker, Inc.
- Dharma Salam. 2007. *Manajemen Pemerintahan Di Indonesia*, Jakarta ; PT Djambatan
- Hood, C. (1995 : 12). *The New Public Management* dalam *A Two-Country Comparison of PublicSector Performance Reporting: The Tortoise and Hare. Financial Accountability &Management*, 17 (3), Agustus 2001.
- Hagemenn, Gisela. 1992 *Kepemimpinan Dan Motivasi untuk Pembinaan Organisasi*. Diterjemahkan Oleh Fery Dwi Nugroho. Jakarta : LPM. (Seri Manajemen dan Pemerintah) No. 146
- Ndraha, Taliziduhu, 1991.*Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, H Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian terapan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Moleong, (2006) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Millet dalam Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Erlangga, (1998 : 76).
- Osborne, David and Gaebler, Ted, *Reinventing Government (How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector)*, Addison-Wesley Publishing company, Inc, (1992 : 472- 473).
- Siagian, Sodang P. *Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1985.
- Solly Lubis, (2007) *Implementasi Kebijakan Publik*, CV Mandar Maju Bandung
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 1998, cetakan kelima
- Simamora, Henry.1995.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE TKPN.
- Todaro, Michael, P. (2000 : 224). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jilid I. Edisi Ketujuh*.

- Erlangga. Jakarta.ISBN
9794116181, 9789794116180.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar
Administrasi Penibangunan*. Jakarta:
LP3ES, 1987
- Tjokrowinoto, Moeljarto.(1997 : 167).
*Politik Pembangunan, Sebuah
Analisis Konsep dan Strategis*.
Yogyakarta:Tiara Wacana.
- Wahab, Solichin Abdul. (2004).
*Analisis Kebijakan Dari
Formulasi ke Implementasi
Kebijakan Negara*. Jakarta: PT
Bumi Aksara.